



**KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO MENTERI KEUANGAN  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
TENTANG**

**JAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI-FRAKSI DPR RI  
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2021 BESERTA NOTA KEUANGANNYA  
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2020**

---

*Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,  
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,  
Om Swastiastu,  
Namo Buddhaya,  
Salam Kebajikan,*

**Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, pagi ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk melaksanakan tugas kenegaraan dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021, beserta Nota Keuangannya.

**Belum lama ini, tepatnya tanggal 29 Agustus, DPR RI memasuki usia yang ke-75 tahun.** Usia yang relatif panjang dalam menjaga kepercayaan masyarakat, mewakili aspirasi rakyat sebagai perwujudan demokrasi Indonesia yang bersih dan modern.

Kompleks DPR Senayan serasa kantor kedua bagi saya sebagai bendahara umum negara dalam menyusun dan membahas berbagai kebijakan di bidang keuangan negara. DPR, sebagai mitra sekaligus pengawas Pemerintah dalam penyusunan regulasi dan pertanggungjawaban kinerja Pemerintah, telah menjalin kolaborasi yang sangat baik. Setiap kebijakan harus selalu mendapatkan penguatan kualitas yang merepresentasikan kepentingan rakyat. Kontrol DPR merupakan salah satu perwujudan demokrasi Pancasila yang merupakan amanah pendiri bangsa Indonesia.

**Saya mengucapkan dirgahayu ke-75 untuk DPR RI.** Terima kasih atas kerja keras dan dukungan yang baik selama ini. Saya berharap DPR RI menjadi semakin solid dalam mewujudkan parlemen yang modern, terbuka, menjadi rumah rakyat yang kredibel dan dipercaya untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita Indonesia Maju.

**Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

RAPBN 2021 disusun dalam kondisi tekanan dan ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi Covid-19. Hal ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap kondisi kesehatan, sosial, dan ekonomi baik di global maupun nasional. Pemerintah terus melakukan langkah-langkah

kebijakan luar biasa untuk menjaga dan memulihkan kondisi kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan dunia usaha. Dengan dukungan penuh seluruh anggota Dewan, langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian di tahun 2021.

Pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua Fraksi DPR-RI atas berbagai masukan, saran, pandangan serta dukungannya terhadap RUU APBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya, perkenankanlah kami memberikan apresiasi terhadap pandangan Fraksi-Fraksi DPR-RI yang disampaikan oleh Bapak Dr. Sihar P.H. Sitorus (**Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**), Bapak H. Bobby Adhityo Rizaldi (**Fraksi Partai Golongan Karya**), Bapak Ir. H. Kamrussamad (**Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya**), Bapak H. Charles Meikyansyah (**Fraksi Partai Nasdem**), Ibu Anggia Ermarini (**Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**), Bapak H. Wahyu Sanjaya (**Fraksi Partai Demokrat**), Bapak Dr. H. Hermanto (**Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**), Bapak H. Jon Erizal (**Fraksi Partai Amanat Nasional**), dan Ibu Ema Umiyyatul Chusnah (**Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**) yang memberikan dorongan kepada Pemerintah untuk terus melakukan upaya penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021. Pemerintah meyakini bahwa dukungan dari seluruh komponen bangsa, dengan semangat gotong-royong, akan menentukan keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Sejalan dengan kebijakan *extraordinary* yang telah dan sedang dilakukan di tahun 2020 melalui UU No. 2 tahun 2020 sebagai penetapan Perppu No. 1 tahun 2020, Pemerintah melakukan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), mulai di bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda, UMKM, insentif usaha, hingga korporasi dengan anggaran sekitar Rp695,2 triliun.

Di tahun 2021 langkah lanjutan program PEN akan dilakukan dengan anggaran sekitar Rp356,5 triliun, mulai dari penanganan di bidang kesehatan melalui pengadaan vaksin dan perbaikan di bidang kesehatan, perlindungan sosial, hingga ke dukungan pada dunia usaha dan UMKM.

Penurunan anggaran PEN didasarkan pada perkiraan biaya untuk penanganan pasien Covid-19 yang akan jauh berkurang dibandingkan kondisi di tahun 2020 dan fokus Pemerintah dalam penyediaan Vaksin di tahun 2021. Namun demikian, anggaran kesehatan tetap dialokasikan cukup besar mencapai 6,2 persen dari APBN di tahun 2021, yang jauh di atas amanat UU Kesehatan sebesar 5 persen dari APBN. Beberapa program perlindungan sosial juga direncanakan tidak seluas dan sebesar manfaatnya di tahun 2020, sejalan dengan harapan semakin Bergeraknya roda perekonomian dan terciptanya lapangan kerja baru. Dukungan pada UMKM, Korporasi, dan insentif pada dunia usaha juga direlaksasi secara bertahap seiring pulihnya perekonomian nasional.

**Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat,**

**Menanggapi pandangan dari F-PDIP, F-Partai Golkar, F-Partai Nasdem, F-PKB, F-Partai Demokrat, F-PKS, F-PAN, dan F-PPP** terkait target pertumbuhan ekonomi dapat disampaikan bahwa di tengah tingginya ketidakpastian dampak pandemi Covid-19, Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 pada tingkat yang moderat yaitu sebesar 4,5 - 5,5 persen. Rentang perkiraan yang cukup lebar juga terjadi pada proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh lembaga-lembaga Internasional. Tahun 2021, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,1 persen, sementara World Bank 4,8 persen, dan ADB 5,3 persen.

Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2021 akan ditentukan oleh beberapa faktor utama, yaitu:

- 1) keberhasilan penanganan pandemi Covid-19, termasuk upaya riset vaksin;
- 2) kondisi pemulihan kinerja perekonomian global, terutama dipengaruhi penanganan pandemi Covid-19, faktor geopolitik - pasca pemilu Amerika, dinamika hubungan Amerika dan Tiongkok, serta harga komoditas.
- 3) upaya reformasi struktural untuk meningkatkan kemudahan usaha dan menarik investasi; dan
- 4) dukungan kebijakan fiskal yang bercorak *countercyclical* termasuk melalui lanjutan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Pemerintah berkeyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 persen - 5,5 persen cukup realistis dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, dan *baseline* pertumbuhan ekonomi yang rendah di tahun 2020.

Pemerintah sepakat bahwa penanganan pandemi Covid-19 yang menyeluruh menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional dan mengembalikan pertumbuhan ekonomi ke jalur alamiahnya. Oleh karena itu, pemerintah mengalokasikan untuk keberlanjutan program pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 sebesar Rp356,5 triliun. Alokasi ini terutama untuk penyediaan dan distribusi vaksin sebagai salah satu prioritas Pemerintah dan bantuan sosial untuk mendukung dan mempertahankan daya beli masyarakat menengah-bawah yang masih terdampak, serta dukungan bagi dunia usaha terdampak, UMKM dan korporasi, untuk membangkitkan kembali aktivitas usahanya.

Ditinjau dari sisi komponen sumber pertumbuhan ekonomi di tahun 2021, Pemerintah memandang adanya pemulihan dari sisi permintaan domestik, khususnya konsumsi dan investasi. Komponen ini diperkirakan kembali berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Komitmen Pemerintah dalam menjaga stabilitas tingkat inflasi

diharapkan mampu mengembalikan level kepercayaan masyarakat untuk kembali melakukan aktivitas belanja dan mobilitas secara normal. Kinerja investasi (PMTB) diperkirakan akan naik tajam sejalan dengan keberlanjutan pembangunan infrastruktur, serta upaya reformasi struktural yang mendorong kemudahan berusaha dan daya tarik investasi.

Kinerja ekspor diperkirakan lebih baik meskipun akan sangat bergantung pada kondisi pemulihan kinerja ekonomi global. Ekspor akan didorong melalui perluasan negara yang potensial sebagai tujuan ekspor serta diversifikasi produk ekspor. Sementara impor diarahkan pada pemenuhan kebutuhan domestik sesuai dengan prioritas nasional terutama untuk bahan baku dan barang modal.

Dari sisi *supply*, Pemerintah memandang bahwa tahun 2021 menjadi tahun pemulihan sekaligus momentum untuk reformasi struktural guna mendorong produktivitas dan daya saing industri. Sektor Industri Pengolahan diharapkan kembali menjadi *engine of growth* dengan dukungan berbagai upaya kebijakan pemulihan dan upaya revitalisasi. Perbaikan infrastruktur digital juga akan mampu mendorong sektor terkait ekonomi digital dan sektor yang menggunakan teknologi tinggi, seperti sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan, serta jasa perdagangan ritel dan sektor UMKM untuk tumbuh di atas rata-rata nasional. Di samping itu, Pemerintah tetap memprioritaskan ketahanan pangan dan ketahanan energi sebagai penopang untuk menggerakkan perekonomian nasional.

**Sejalan dengan pandangan dari F-PDIP, F-PKB, F-Partai Demokrat, dan F-PKS** agar kebijakan fiskal dapat ditujukan untuk memperbaiki indikator kesejahteraan, Pemerintah akan terus mendorong pemerataan akses penduduk terhadap kebutuhan dasar seperti ketersediaan pangan dan papan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas

pendidikan. Membaiknya pertumbuhan ekonomi yang diiringi kondisi makro-ekonomi yang stabil di tahun 2021 akan menjadi momentum positif bagi Pemerintah dalam upaya menurunkan indikator kemiskinan dan ketimpangan setelah terjadi peningkatan di tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Berbagai program Pemerintah, khususnya perlindungan sosial dan insentif dunia usaha, diharapkan dapat mendukung penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka masing-masing menjadi 9,2–9,7 persen dan 7,7–9,1 persen, dengan tingkat rasio gini menurun menjadi 0,377–0,379 pada tahun 2021. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan meningkat menjadi 72,78–72,95 yang mengindikasikan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

### **Hadirin yang saya muliakan,**

Pemerintah menghargai pandangan dan perhatian dari **F-Partai Gerindra, F-PKB, F-PKS, F-PAN, dan F-PPP** terkait target penerimaan perpajakan yang disusun oleh Pemerintah. Dalam menyusun target, Pemerintah senantiasa mempertimbangkan peran Perpajakan sebagai sumber penerimaan, instrumen dalam mendukung stabilitas perekonomian, dan redistribusi pendapatan yang berkeadilan. Di samping itu, Pemerintah juga memperhatikan berbagai faktor ekonomi lainnya seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, kondisi sektoral dan regional, iklim investasi, daya saing usaha, serta daya beli masyarakat yang mencerminkan potensi penerimaan pajak dan kemampuan masyarakat dalam membayar (*ability to pay*). Dengan demikian, diharapkan perpajakan tidak hanya mampu mendukung pendanaan bagi pencapaian target-target pembangunan, tetapi juga dapat menjaga keseimbangan di dalam aktivitas perekonomian.

Pada tahun 2021, Pemerintah memperkirakan penerimaan perpajakan tumbuh moderat sebesar 5,5 persen dari target Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Target tersebut dipandang sejalan dengan kegiatan perekonomian yang diharapkan sudah mulai membaik di tahun 2021, baik domestik maupun global. Namun demikian, harus diantisipasi bahwa berdasarkan data terbaru, risiko ketidakpastian akibat Covid-19 masih relatif tinggi. Outlook realisasi penerimaan perpajakan diperkirakan akan lebih rendah dari yang ditargetkan di tahun 2020 dan membuat rasio perpajakan akan lebih rendah dari yang diperkirakan. Kondisi ini juga akan berdampak terhadap potensi penerimaan perpajakan di tahun 2021.

Perluasan basis penerimaan pajak akan menjadi kunci keberhasilan upaya optimalisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 dan pada tahun-tahun yang akan datang. Hal ini akan dapat diwujudkan apabila program Reformasi Perpajakan yang saat ini sedang dilaksanakan terus diperkuat dan diakselerasi, baik reformasi kebijakan (*policy*) maupun administrasi. Program reformasi perpajakan tersebut diterjemahkan ke dalam perbaikan pada lima pilar utama, yaitu Regulasi Perpajakan, Organisasi, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Basis Data, serta Proses Bisnis.

Berbagai langkah reformasi tersebut sudah menunjukkan hasil yang signifikan, seperti modernisasi organisasi, kemudahan layanan bagi wajib pajak (antara lain *e-filing*, *e-registration* dan program *click-call-counter*), pengawasan dan penegakan hukum yang lebih terstruktur dan berkeadilan melalui implementasi *Compliance Risk Management*, serta meningkatnya kehandalan sistem informasi dan teknologi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas data internal dan eksternal yang dimiliki. Capaian reformasi perpajakan terakhir yang juga sangat signifikan adalah implementasi *Taxpayer Accounting* modul *Revenue Accounting System*



(RAS) oleh DJP pada bulan Juli 2020, sebagai upaya memperbaiki tata kelola piutang pajak sekaligus menindaklanjuti temuan BPK.

Di area kebijakan, Pemerintah telah melakukan terobosan antara lain program *tax amnesty*, penghapusan sanksi administrasi melalui program *reinventing policy*, revaluasi aset, kenaikan PTKP, penerapan PPh Final tarif 0,5% untuk WP UMKM, penurunan tarif PPh Badan, implementasi PPN PMSE serta berbagai insentif dalam rangka penanganan Covid-19. Berbagai kajian dan evaluasi terkait dengan subyek-obyek-tarif pajak, pengecualian (*exemption*), mekanisme pengenaan pajak final, serta insentif yang telah diterbitkan terus dilakukan untuk memperoleh kebijakan perpajakan yang optimal, memberikan rasa keadilan, mengikuti perkembangan terkini, mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta pada saat yang bersamaan dapat memperluas basis perpajakan. Pemerintah juga akan terus melakukan reformasi pajak berbasis analisis dan data.

Kami menyadari bahwa reformasi perpajakan membutuhkan pentahapan dan jangka waktu yang tidak singkat. Pemerintah mengharapkan dukungan semua pihak agar agenda reformasi perpajakan ini dapat terus didorong dan dipercepat realisasinya.

Pemerintah menyambut baik dorongan **F-PDIP, F-PKB, F-Partai Demokrat, dan F-PPP** agar mengoptimalkan penerapan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Mulai 1 Juli 2020, Pemerintah secara resmi mengenakan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri yang merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, penerapan PPN produk digital dari luar negeri juga diharapkan dapat menciptakan kesetaraan berusaha (*level playing field*) antar pelaku usaha.

Di bidang Kepabebean akan dilakukan penyempurnaan sistem *National Logistics Ecosystem* (NLE) dengan target antara lain mendukung efisiensi biaya logistik, penurunan waktu logistik dari 111 jam menuju target 55,8 jam, serta peningkatan peringkat *Trading Across Border* (TAB) dalam *Ease of Doing Business* (EoDB). Untuk meningkatkan penerimaan Cukai, akan dilakukan pengembangan sistem pengawasan cukai terintegrasi (*excise connection*), serta pemberantasan dan penurunan peredaran Barang Kena Cukai ilegal.

Di sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pemerintah mengapresiasi dukungan **F-PDIP, F-Partai Gerindra, F-PKB, F-PKS, F-PAN dan, F-PPP**, terkait optimalisasi PNBP dan penyelesaian peraturan turunan UU PNBP. Dalam waktu dekat diharapkan dapat diselesaikan penetapan empat RPP turunan UU tentang PNBP. Untuk mengoptimalkan PNBP dilakukan dengan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan, inovasi layanan, perbaikan proses perencanaan dan pelaporan PNBP yang didukung sistem teknologi informasi yang terintegrasi, serta perkiraan membaiknya harga komoditas SDA.

### **Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat**

Menanggapi pernyataan dari **F-Partai Gerindra, F-PKB, F-Partai Demokrat, F-PKS, F-PAN, dan F-PPP** mengenai Belanja Negara yang efektif dan efisien sesuai skala prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara terukur, terarah, dan akuntabel dapat disampaikan bahwa RAPBN 2021 disusun dengan mempertimbangkan keberlanjutan pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19, sehingga RAPBN tahun 2021 disusun sebagai instrumen *countercyclical* untuk pemulihan ekonomi dalam jangka pendek dan mengembalikan kepada jalur pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

Alokasi Belanja Negara tahun 2021 sebesar Rp2.747,5 triliun diharapkan menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong perekonomian untuk tumbuh 4,5 - 5,5 persen. Pembangunan ekonomi diarahkan pada bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, perlindungan sosial, ketahanan pangan, infrastruktur, dan pariwisata sejalan dengan prioritas akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, pada tahun 2021, Pemerintah melakukan reformasi penganggaran, antara lain melalui Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran dimana dilakukan penyederhanaan dan pengurangan jumlah program K/L. Hal ini bertujuan agar program K/L lebih terintegrasi dan bersifat lintas, melalui pendekatan peningkatan integrasi dan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L untuk mendorong efektivitas pembangunan nasional, pengurangan potensi duplikasi kegiatan antar K/L dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran belanja negara, dan penajaman rumusan program, serta harmonis antara belanja pusat maupun belanja daerah

Perbaikan pengelolaan fiskal lainnya adalah dengan terus meningkatkan efisiensi belanja operasional K/L dan juga di Pemda, guna menyesuaikan dengan kondisi pola kerja yang baru ke depan, didasarkan pada pengalaman di tahun 2020 ini.

Melalui langkah-langkah perbaikan tersebut di atas diharapkan kualitas belanja berbasis kinerja dapat ditingkatkan untuk diarahkan pada belanja yang produktif dalam mendukung reformasi kesehatan, peningkatan kualitas SDM, pemulihan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta pengurangan pengangguran dan kemiskinan.

**Menanggapi pertanyaan F-Partai Gerindra, F-Partai Nasdem, F-PKB, F-PKS, dan F-PAN** terkait kebijakan dan alokasi anggaran kesehatan, pemerintah terus berupaya untuk memenuhi anggaran kesehatan sesuai dengan Undang-undang. Pada tahun 2021, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,7 triliun atau setara dengan 6,2 persen dari belanja negara. Reformasi sistem kesehatan akan dilakukan dengan tujuan memperkuat kapasitas sistem kesehatan baik dari aspek ketahanan kesehatan, pemerataan pelayanan kesehatan, serta penguatan aspek promotif preventif kepada masyarakat. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat termasuk kesiapan sistem dalam menghadapi kondisi terburuk seperti pandemi Covid-19 ini di masa mendatang.

Pemerintah sepakat bahwa keberadaan vaksin akan berdampak kepada keberhasilan penanganan Covid-19. Untuk itu, dalam RAPBN tahun 2021 Pemerintah telah mengantisipasi alokasi untuk kebutuhan pengadaan vaksin dan imunisasi, alokasi untuk sarana dan prasarana, serta laboratorium dan litbang untuk penguatan riset vaksin. Upaya pengadaan vaksin direncanakan menggunakan produksi dalam negeri melalui kerjasama, termasuk transfer pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, pengembangan vaksin memperhatikan aspek cepat, efektif, dan mandiri. Hingga saat ini, proses pengadaan vaksin memasuki tahap uji klinis, sebelum dapat diproduksi, didistribusi, dan digunakan secara massal. Proses pengadaan vaksin sampai dengan proses vaksinasi kepada masyarakat, termasuk distribusi vaksin dan penyiapan personel medis, akan melibatkan koordinasi dan sinergi yang intensif antara K/L, BUMN, Pemda, dan swasta.

**Menjawab pertanyaan dari F-Partai Gerindra, F-Partai Nasdem, F-PKB, F-PKS dan F-PPP** tentang pemanfaatan anggaran pendidikan, dapat disampaikan bahwa anggaran pendidikan akan

digunakan secara optimal untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di tengah kondisi pemulihan pandemi Covid-19. Pada era adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi Covid-19, kegiatan di bidang pendidikan dilaksanakan secara daring yang menuntut kesiapan dari segi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). K/L terkait telah dan akan terus bekerja sama untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas siswa terhadap bahan dan *platform* pembelajaran daring.

Pada tahun 2021, anggaran pendidikan diarahkan untuk melanjutkan dan memperluas kebijakan yang sudah berjalan seperti penyediaan BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BOPTN (Bantuan Operasional PTN), bantuan pendidikan bagi siswa/mahasiswa miskin melalui PIP dan KIP kuliah, penyediaan berbagai tunjangan guru dan dosen, serta diarahkan untuk mendukung reformasi sistem pendidikan dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan kompetensi guru dan pembelajaran di sekolah akan dikembangkan dengan fokus pada peningkatan literasi dan numerasi untuk mendukung pencapaian skor PISA yang lebih tinggi. Kurikulum pembelajaran akan disederhanakan agar dapat berorientasi pada kompetensi siswa yang secara konkrit dapat dilakukan dan dapat dengan mudah diukur oleh guru.

**Menjawab pertanyaan F-PDIP, F-Partai Golkar, F-Partai Gerindra, F-PKB, F-PKS dan F-PAN** terkait Anggaran Kemiskinan/Perlindungan Sosial kiranya dapat dijelaskan bahwa dengan kondisi perekonomian dan inflasi yang berangsur membaik, tingkat kemiskinan diperkirakan berada di kisaran 9,2–9,7 persen. Perbaikan kondisi makro juga memberikan dampak yang luas sehingga lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan rentan dapat kembali tercipta, iklim investasi terjaga, dan infrastruktur terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan dapat dikembangkan.

Dalam rangka mendukung pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing, Pemerintah pada tahun 2021 akan melanjutkan pelaksanaan program perlindungan sosial melalui PKH, Kartu Sembako, dan melanjutkan pemberian bansos tunai, serta melanjutkan pelaksanaan program Kartu Prakerja. Di samping itu, berkaca pada penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah akan melakukan penguatan pelaksanaan program perlindungan sosial untuk mempercepat penurunan kemiskinan akibat pandemi Covid-19, dengan melaksanakan reformasi sistem perlindungan sosial.

Reformasi sistem perlindungan sosial dilakukan melalui perbaikan data masyarakat miskin dan rentan, integrasi dan digitalisasi penyaluran bantuan sosial, pengembangan sistem perlindungan sosial yang adaptif, serta penyempurnaan mekanisme pendanaan perlindungan sosial. Pemerintah memandang perlunya melakukan reformasi sistem perlindungan sosial sebagai langkah besar untuk menjamin ketepatan sasaran sehingga memberikan hasil yang optimal dalam membantu masyarakat yang kurang mampu.

**Menjawab pertanyaan dari F-PDIP, F-Partai Gerindra, F- PKS, dan F-PPP,** Pemerintah sependapat untuk menguatkan platform kemandirian ketahanan pangan di sektor pertanian melalui perbaikan iklim usaha dan peningkatan daya saing. Pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan *food estate* di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua. Pengembangan ini akan dilaksanakan melalui sistem pertanian modern, pemulihan lingkungan tanah gambut dan penataan hutan, serta dukungan para pemangku kepentingan dalam integrasi perencanaan dan kolaborasi pembangunan *food estate* berkelanjutan.

**Menanggapi pandangan F-Partai Gerindra, F-Partai Nasdem, dan F-PKS** terkait belanja infrastruktur dapat kami sampaikan bahwa salah satu kebijakan yang dilakukan untuk pemulihan

ekonomi diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang padat karya serta mendukung kawasan industri dan pariwisata agar mampu memberikan *multiplier effect* yang besar bagi perekonomian nasional.

Pembangunan bidang infrastruktur pada tahun 2021 diarahkan untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, serta dukungan pemulihan ekonomi. Arah kebijakan tahun 2021 yaitu: (1) penguatan infrastruktur digital serta efisiensi logistik dan konektivitas; (2) pembangunan diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata; (3) pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar (air, sanitasi, pemukiman) untuk mendukung penguatan sistem kesehatan nasional; dan (4) penyelesaian kegiatan-kegiatan prioritas yang tertunda pada tahun 2020.

**Menjawab pertanyaan dari F-PDIP, dan F-PPP** mengenai literasi di bidang digital guna meningkatkan produktivitas nasional dan mempercepat upaya pemulihan, kiranya dapat dijelaskan bahwa Literasi Digital menjadi perhatian serius Pemerintah karena merupakan kunci kesiapan SDM Indonesia untuk menghadapi era transformasi digital. Seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan teknologi digital dan internet secara produktif dan bertanggung jawab.

Dalam rangka mendukung peningkatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kebijakan dan strategi Pemerintah antara lain (1) penyediaan layanan telekomunikasi dan internet yang dapat dijangkau masyarakat, melalui pemberian kemudahan perizinan penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi dan internet; dan (2) optimalisasi dana *Universal Service Obligation* (USO) dalam menyediakan dan menjaga kualitas layanan akses telekomunikasi dan internet, melalui penyediaan BTS untuk desa nonkomersial, dan

penyediaan satelit multifungsi untuk akses internet. Pada tahun 2021 pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan akses telekomunikasi dengan menyediakan 5.053 BTS di daerah 3T dan perbatasan, akses internet di 12.377 lokasi layanan publik, penyediaan kapasitas satelit, dan pemanfaatan *backbone* Palapa Ring yang telah dibangun.

### **Para Anggota Dewan yang kami hormati**

Menanggapi pertanyaan dari **F-PDIP, F-Partai Gerindra, F-Partai Nasdem, F-PKB, F-Partai Demokrat, dan F-PKS** terkait arah kebijakan Pemerintah dalam mengoptimalkan TKDD untuk memperkuat penanganan pandemi Covid-19 dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut. Arah kebijakan TKDD 2021 disusun dengan mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan TKDD akibat dampak pandemi Covid-19 dan upaya penguatan kualitas desentralisasi fiskal. Kebijakan TKDD dalam RAPBN 2021 diarahkan untuk peningkatan *quality control* anggaran dan peran daerah dalam pemulihan ekonomi, serta peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja negara, dilakukan peningkatan sinergi antara belanja K/L dengan TKDD, utamanya untuk jenis TKDD yang telah ditentukan penggunaannya. Kualitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus juga ditingkatkan melalui penerapan penyaluran yang berbasis kinerja dan upaya peningkatan akuntabilitas.

Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, kebijakan TKDD fokus pada pembangunan aksesibilitas dan konektivitas sentra-sentra pertumbuhan, penguatan ketahanan pangan, dukungan insentif untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, dukungan terhadap UMKM, dan mendorong terwujudnya pembiayaan kreatif dalam



pembangunan infrastruktur daerah. Kebijakan TKDD juga didukung upaya perbaikan pengelolaan APBD, antara lain melalui implementasi Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan penyempurnaan Bagan Akun Standar (BAS).

Sebagai respon Pandemi Covid-19 dan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, kebijakan Dana Desa tahun 2021 diarahkan: (1) mendukung pemulihan perekonomian desa melalui pelaksanaan program padat karya tunai, jaring pengaman sosial berupa BLT Desa, pemberdayaan UMKM dan sektor usaha pertanian, program pengembangan potensi desa, dan penguatan peran BUMDes; dan (2) pengembangan sektor prioritas melalui pengembangan desa digital, desa wisata, usaha budidaya peternakan perikanan, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

### **Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat**

**Menanggapi pertanyaan dari F-PDIP, F-Partai Golkar, F-Partai Gerindra, F-Partai Nasdem, F-PKB, F-Partai Demokrat, F-PKS, dan F-PPP** perihal Defisit dan Pembiayaan utang dapat kami sampaikan bahwa dampak krisis kesehatan kepada perekonomian membuat banyak negara melakukan berbagai langkah kebijakan *extraordinary*, termasuk Indonesia. Pada awalnya, defisit APBN 2020 direncanakan sebesar 1,76 persen PDB, terendah dalam lima tahun terakhir. Namun demikian, upaya penanganan Covid-19 beserta dampaknya mengharuskan Pemerintah mengeluarkan kebijakan pelebaran defisit sampai dengan 6,34 persen dari PDB. *Trajectory* perkembangan Pandemi Covid-19 di Indonesia maupun berbagai negara lain memperlihatkan ketidakpastian yang sangat tinggi, bahkan di beberapa negara yang sebelumnya dianggap telah berhasil mengendalikan penyebaran virus ternyata harus mengalami gelombang

kedua. Ketidakpastian ini sangat mungkin masih berlanjut tahun depan, sehingga penerimaan pajak maupun PNBPN masih akan mengalami tekanan. Kebutuhan APBN untuk bisa lebih fleksibel merespon kondisi ketidakpastian tersebut masih akan memerlukan ruang fiskal besar dari sumber pembiayaan.

Sejalan dengan amanat UU No. 2 tahun 2020, defisit APBN tahun 2021 direncanakan untuk turun menjadi 5,5 persen dari PDB. Angka defisit yang masih relatif tinggi ini merupakan pilihan objektif sebagai upaya melanjutkan penanganan pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional, ketika potensi sisi penerimaan belum sepenuhnya pulih. Besaran defisit juga telah mempertimbangkan kebijakan fiskal konsolidatif secara bertahap kembali menuju batasan maksimal 3 persen PDB di tahun 2023.

Pemerintah sependapat dengan pandangan fraksi-fraksi DPR bahwa pengelolaan utang negara harus dilaksanakan dengan cermat dan hati-hati. Pembiayaan utang dari pasar keuangan berupa penerbitan SBN tetap dilakukan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri (global). Sebagai bagian dari langkah *extraordinary* dalam pembiayaan APBN 2020, Pemerintah telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam rangka pembiayaan penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia telah memberikan dukungan melalui pembelian SBN di pasar perdana dan berperan sebagai *backstop/last resort*. Selain itu, koordinasi Pemerintah dengan Bank Indonesia juga dilanjutkan melalui kesepakatan berbagi beban (*burden sharing*) yang bersifat *one-off*. Dalam penerbitan SBN di dalam negeri untuk tahun 2021, Pemerintah akan merumuskan kesepakatan bersama dengan Bank Indonesia dengan tetap menjaga kredibilitas dan integritas pengelolaan ekonomi, fiskal, dan moneter.

Pemerintah juga sependapat dengan pandangan **F-Partai Golkar, F-PKB, dan F-PKS** terkait pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal dan dukungan pembiayaan nonutang, dengan mengalokasikan penggunaan SAL sebesar Rp70,6 triliun sebagai pembiayaan lain-lain dalam APBN Tahun 2020. Penggunaan SAL tersebut telah diperhitungkan dengan cermat untuk tetap sesuai dengan kebutuhan *buffer cash* dan sebagai bagian untuk meminimalkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

**Selanjutnya, Pemerintah sepakat dengan pandangan F-PDIP** terkait investasi pemerintah agar disertai indikator capaian manfaat ekonomi dan sosial yang akan diperoleh. Kebijakan investasi kepada BUMN bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha sehingga BUMN yang bersangkutan memiliki kemampuan dalam menjalankan penugasan program prioritas, khususnya turut mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemberian investasi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi serta manfaat sosial bagi masyarakat luas.

**Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Demikianlah tanggapan Pemerintah atas Pemandangan Umum DPR RI berkenaan dengan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2021 beserta Nota Keuangannya. Tanggapan atas Pemandangan Umum yang lengkap dan terinci kami sampaikan juga di dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisah dari jawaban yang telah kami sampaikan saat ini.

Kami menyambut baik dukungan anggota Dewan yang terhormat untuk membahas lebih lanjut RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2021 beserta Nota Keuangannya, pada tahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan jadwal yang telah

disepakati. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara Indonesia yang tercinta, Amin Yaa Rabbal Alamin.

Sekian dan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,  
Om Shanti Shanti Shanti Om,***

**Jakarta, 1 September 2020  
a.n. Pemerintah Republik Indonesia  
Menteri Keuangan,**

**Ttd**

**Sri Mulyani Indrawati**